

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kutipan dalam Siagian tahun 1984 mengatakan bahwa bidang ekonomi yang terbelakang menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh negara berkembang. Sudah sepantasnya jika kita meletakkan perhatian yang utama pada permasalahan ekonomi saat ini. Permasalahan yang muncul seperti tindak kriminal atau kejahatan pada umumnya bermula dari permasalahan ekonomi. Selain itu, rendahnya tingkat ekonomi suatu negara juga menimbulkan permasalahan yang dapat memperburuk keadaan suatu negara. Pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab atas kebijakan untuk memperbaiki perekonomian yang dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat .

Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum yang dimaksud adalah kesejahteraan dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Makna keadilan sosial yaitu kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan di berbagai daerah. Tujuan utama yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia adalah meningkatkan perekonomian.

Proses pembangunan tidak dapat tercapai dengan sendirinya, melainkan harus adanya usaha dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Usaha yang optimal dalam pembangunan dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada kenaikan pendapatan semata, tetapi juga dapat memperbaiki kondisi kehidupan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan dan sosial budaya.

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah ketika seluruh masyarakat berada pada keadaan yang sama. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan di mana seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai tingkat kemakmuran. Pada kenyataannya, tingkat kemakmuran antar daerah berbeda-beda meskipun dalam satu provinsi. Ada daerah yang memiliki tingkat pendapatan tinggi, namun juga ada yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Padahal, kebutuhan yang harus mereka penuhi rata-rata pada tingkat yang sama. Hal ini menyebabkan munculnya masalah ketimpangan ekonomi antar daerah.

Adanya desentralisasi maka muncullah otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk berkembang secara mandiri, tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Tujuan adanya desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Kuncoro, 2010). Kebijakan otonomi menjadikan pemerintah daerah lebih

fokus memperhatikan dan mengatasi permasalahan yang ada di suatu daerah. Perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pembangunan daerah. Masing-masing daerah akan menciptakan pembangunan secara mandiri yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pendapatan ekonomi daerah meningkat dan mengurangi ketimpangan.

Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999). Dalam rangka menciptakan pembangunan daerah, tidak semata-mata terfokus pada pendapatan daerah yang terus meningkat, akan tetapi perlu juga diperhatikan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Eksploitasi tanpa batas yang terus dilakukan untuk mencapai pembangunan daerah dapat merusak lingkungan dan stabilitas ekosistem di kemudian hari. Dengan adanya pengelolaan sumber daya yang ada secara tepat, dapat membantu mengoptimalkan produktifitas barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkaitan dengan peningkatan *output* agregat (produksi barang dan jasa) atau biasa diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Tambunan, 2001). Untuk meningkatkan PDRB perlu menganalisis potensi perekonomian yang terdapat di daerah tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah kondisi ekonomi masyarakat,

sumber daya lokal yang tersedia, kemampuan sumber daya manusia dan juga infrastruktur.

Besarnya PDRB pada suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya kontribusi sektor ekonomi pada masing-masing daerah. Sektor ekonomi yang digunakan untuk menghitung PDRB dalam penelitian ini terdiri dari 17 sektor, yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) sektor pertambangan dan penggalan, (3) sektor industri pengolahan, (4) sektor pengadaan listrik dan gas, (5) sektor pengadaan air, pengolahan sampah limbah, dan daur ulang, (6) sektor konstruksi, (7) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, (8) sektor transportasi dan pergudangan, (9) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) sektor informasi dan komunikasi, (11) sektor jasa keuangan dan asuransi, (12) sektor *real estate*, (13) sektor jasa perusahaan, (14) sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) sektor jasa pendidikan, (16) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (17) sektor jasa lainnya.

Masing-masing sektor ekonomi memberikan tingkat kontribusi yang berbeda-beda bagi pendapatan di setiap daerah. Sektor unggulan pada satu daerah belum tentu menjadi sektor unggulan di wilayah lain. Begitu pula kebijakan yang diterapkan untuk pembangunan suatu daerah berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Suatu kebijakan yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu wilayah, belum tentu dapat meningkatkan perekonomian jika diterapkan pada wilayah lain. Perbedaan-

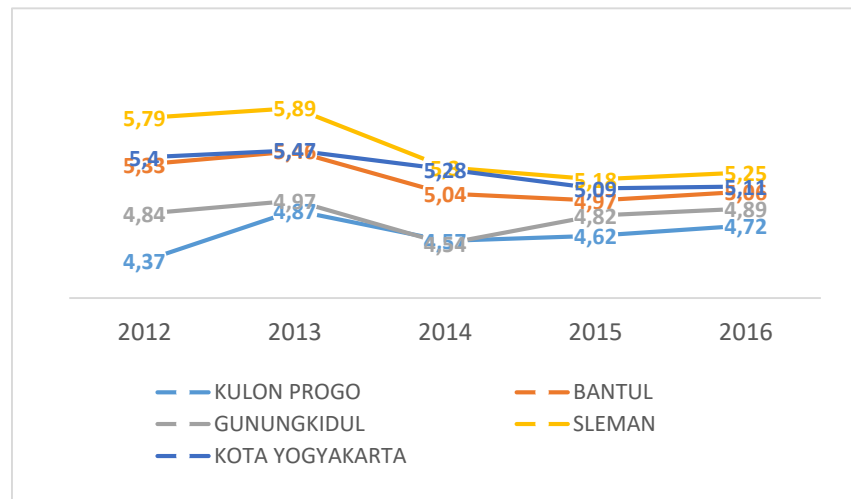
perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan potensi dan geografis pada tiap daerah.

Permerintah daerah dan masyarakatnya harus dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia secara optimal. Semakin besarnya kontribusi yang diberikan oleh setiap sektor ekonomi, semakin besar pula pendapatan daerah yang diperoleh. Pendapatan daerah yang terus-menerus mengalami peningkatan akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu menganalisis seluruh sektor ekonomi untuk menentukan sektor apa saja yang dapat dijadikan sektor unggulan bagi daerah.

Setiap kabupaten harus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya dengan sektor unggulan yang tersedia di daerahnya untuk mewujudkan pembangunan. Pembangunan ekonomi pada tingkat kabupaten akan berpengaruh pada perekonomian tingkat provinsi dan juga pada tingkat nasional. Untuk meningkatkan perekonomian negara atau pada tingkat nasional, maka perlu diperhatikan perekomian pada tingkat kabupaten. Semakin tinggi perekonomian di tingkat kabupaten, maka semakin tinggi pula perekonomian pada tingkat provinsi dan sebaliknya. Namun, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah laju pertumbuhan pada masing-masing daerah. Meskipun seluruh daerah mengalami pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, namun jika terdapat kesenjangan yang cukup besar maka akan terjadi ketimpangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk menyamaratakan perekonomian pada setiap daerah,

pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mendorong perekonomian wilayah.

Masing-masing daerah memiliki luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi sumber daya yang berbeda-beda, sehingga pembangunan yang dilakukan harus menyesuaikan kondisi wilayah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih bijak dalam menentukan kebijakan untuk kemajuan ekonomi daerahnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.

GAMBAR 1.1.

GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN
DI PROVINSI DIY TAHUN 2012-2016 (PERSEN)

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi DIY dari tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 seluruh kabupaten mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan pada sektor-sektor ekonomi di setiap daerah. Pada tahun 2015, Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten kembali mengalami kenaikan.

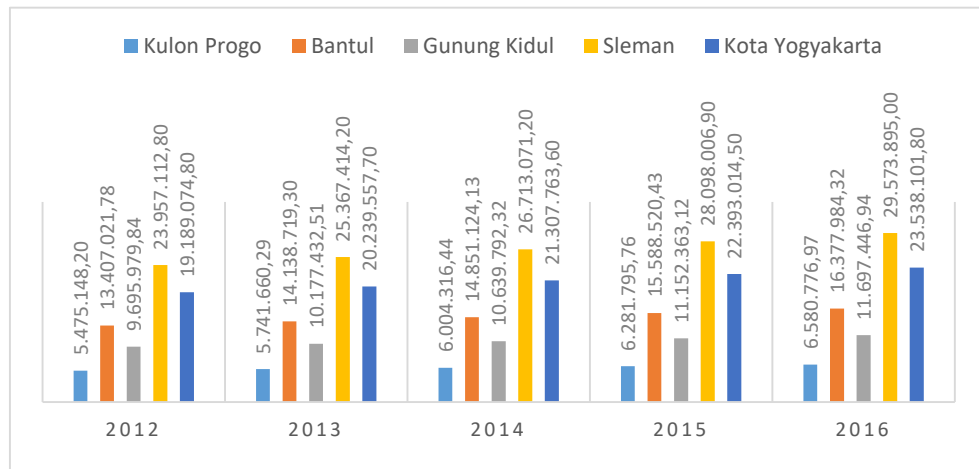
Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten di Provinsi DIY berkisar antara 4,72 persen sampai 5,25 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan ekonomi antar kabupaten semakin menyempit dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 5,25 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah diduduki oleh Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebesar 4,72 persen.

Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 18,40 persen dari luas wilayah DIY dan menduduki tingkat kedua jika dibandingkan dengan luas tiap kabupaten di seluruh Provinsi DIY. Meskipun Kulon Progo memiliki wilayah yang cukup luas,

namun besarnya PDRB yang diperoleh paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Besarnya persentase terhadap total PDRB DIY hanya sebesar 7,54 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan kabupaten lainnya yang rata-rata berkisar antara 13,6 persen sampai 33,7 persen.

Dalam Sastraatmadja tahun 1986 mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat jalannya pembangunan untuk tercapainya cita-cita bangsa yaitu keadaan penduduk yang tidak merata dan sebagian besar sumber daya alam belum dimanfaatkan atau belum diolah secara maksimal. Sumber daya alam yang tersedia antara daerah satu dengan lainnya berbeda-beda. Begitu pula jumlah penduduk antar daerah berbeda-beda pula. Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam dan manusia pada suatu wilayah sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah.

Sektor unggulan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian wilayah. Pengembangan sektor unggulan akan meningkatkan kegiatan ekspor pada suatu daerah dan meningkatkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat. Pada akhirnya, suatu daerah yang awalnya memiliki perekonomian rendah jika dibandingkan daerah lainnya, mampu meningkatkan perekonomian wilayahnya. Pada akhirnya, kesenjangan ekonomi antar daerah pun berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.

GAMBAR 1.2.

GRAFIK PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010 SELURUH KABUPATEN DI PROVINSI DIY TAHUN 2012-2016 (JUTA RUPIAH)

Berdasarkan gambar 1.2, diketahui bahwa PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun laju pertumbuhan ekonominya cukup baik, namun masing-masing kabupaten/kota harus lebih meningkatkan PDRB-nya. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kulon Progo memiliki tingkat PDRB paling rendah. Dari tahun 2012 sampai 2016, besarnya angka PDRB Kabupaten Kulon Progo hanya berkisar antara Rp 5.475.148,20 juta sampai dengan Rp 6.580.776,97 juta, jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lain yang berkisar antara Rp 9.695.979,84 juta sampai dengan Rp 29.573.895,50 juta.

Jika dilihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab tertinggalnya perekonomian Kabupaten Kulon Progo adalah kurangnya penggunaan produk lokal. Masyarakat Kulon Progo lebih banyak menggunakan produk yang berasal dari luar daerah dibandingkan produk lokal. Minimnya penggunaan sumber daya lokal menyebabkan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo kurang baik.

Dari uraian di atas, untuk mengetahui dan mengidentifikasi potensi sektor unggulan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo maka diperlukan sebuah penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat rumusan kebijakan bagi Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah **“ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN (Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada mengkaji sektor ekonomi potensial yang dapat mendukung pengembangan pertumbuhan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 berdasarkan data tahun 2012-2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016?
2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016?
3. Bagaimanakah perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016?
4. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis jabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016.
2. Untuk mengidentifikasi sektor perekonomian basis dan non basis di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016.
3. Untuk mengidentifikasi perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016.
4. Untuk menentukan sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pemerintah daerah khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan bagi pembangunan wilayah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pemerintah daerah: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kulon Progo, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan strategi yang tepat terkait kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Bagi ilmu pengetahuan: memberikan tambahan pengetahuan dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian di masa yang sebelumnya.
- c. Bagi peneliti: sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menambah wawasan serta mampu menjadi motivasi dalam mengkaji lebih lanjut terkait ekonomi regional Kabupaten Kulon Progo.
- d. Bagi masyarakat: sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo.